

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan yang terus dihadapi. Persoalan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui peran negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam membangun kepedulian dan solidaritas sosial. Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai bentuk inisiatif sosial yang dilakukan oleh individu, komunitas, maupun organisasi masyarakat untuk membantu kelompok yang membutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam merespons persoalan sosial inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam memahami praktik filantropi sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Gambar 1.1
World Giving Index (WGI) 2024

RANK	COUNTRY	WORLD GIVING INDEX	HELPED A STRANGER (% OF ADULTS)	DONATED MONEY (% OF ADULTS)	VOLUNTEERED (% OF ADULTS)
1	Indonesia	74	66%	90%	65%
2	Kenya	63	82%	56%	52%
3	Singapore	61	75%	68%	40%
4	The Gambia	61	78%	61%	45%
5	Nigeria	60	81%	45%	53%
6	United States of America	59	76%	61%	39%
7	Ukraine	57	77%	67%	27%
8	Australia	54	69%	59%	34%
9	United Arab Emirates	54	65%	59%	37%
10	Malta	54	56%	74%	31%

Sumber: Charities Aid Foundation (2024)

Gambar 1.1 memperlihatkan posisi Indonesia dalam laporan World Giving Index (WGI) 2024 yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation (CAF), di mana Indonesia tercatat menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan. Melalui WGI, Indonesia tercatat menempati peringkat pertama selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2024. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam WGI

2024, “The ranking that Indonesia takes for the seventh year running, having first overtaken Myanmar in 2017.”¹ Capaian tersebut memperlihatkan kuatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam praktik memberi, terutama melalui tiga bentuk tindakan utama, yaitu menyumbangkan uang, menjadi sukarelawan, dan membantu orang lain. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam WGI menunjukkan bahwa kedermawanan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Gambar 1.2
Perbandingan Peringkat Negara Dermawan Tahun 2022-2025

Rank	2022	2023	2024	2025		Rata-rata pendapatan didonasikan (%)
1.					Nigeria	2,83
2.					Mesir	2,45
3.					Ghana	2,19
4.					China	2,19
5.					Kenya	2,13
6.					Uganda	2,04
7.					UEA	1,92
8.					Qatar	1,92
9.					India	1,92
10.					Malawi	1,80
21.					Indonesia	1,55

Sumber: GoodStats, berdasarkan data Charities Aid Foundation (2025).

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan peringkat negara dermawan berdasarkan WGI dan WGR yang dilakukan oleh CAF. Pada tahun 2025, CAF memperkenalkan pendekatan pengukuran yang berbeda melalui World Giving Report (WGR). Jika WGI lebih menekankan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas memberi, WGR 2025 menggunakan pengukuran yang lebih rinci dengan memperhatikan proporsi pendapatan yang didonasikan. Perubahan metode ini membuat posisi Indonesia dalam WGR 2025 perlu dipahami dalam konteks indikator yang berbeda dari laporan sebelumnya. Dalam WGR 2025, Indonesia berada pada

¹ Charities Aid Foundation, World Giving Index 2024: Global Trends in Generosity (Charities Aid Foundation, 2024), hlm. 3.

peringkat ke-21 dari 101 negara dalam hal proporsi pendapatan yang didonasikan. Masyarakat Indonesia tercatat menyumbangkan rata-rata 1,55% dari pendapatannya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 1,04%. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak lagi berada pada posisi pertama seperti dalam WGI tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa praktik filantropi di Indonesia masih tergolong kuat dalam perbandingan internasional.

Temuan WGR 2025 menunjukkan bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia tidak hanya tercermin dari tingginya partisipasi dalam aktivitas memberi, tetapi juga dari kuatnya basis sosial dan religius yang menopangnya. Laporan tersebut mencatat bahwa 59% responden di Indonesia memberikan bantuan langsung kepada orang atau keluarga yang membutuhkan, 53% berdonasi untuk organisasi atau tujuan keagamaan, dan 44% menyalurkan donasi kepada lembaga amal. Selain itu, sebanyak 68% responden menyatakan bahwa agama menjadi alasan utama mereka untuk berdonasi.² Temuan ini menunjukkan bahwa praktik filantropi di Indonesia banyak berlangsung melalui relasi sosial yang dekat serta didorong oleh nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks tersebut, filantropi dapat dipahami sebagai bagian dari solidaritas sosial yang hidup dalam masyarakat dan berkontribusi pada penguatan modal sosial serta dukungan terhadap kelompok yang membutuhkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari besarnya partisipasi, tetapi juga dari kuatnya basis sosial, kultural, dan religius yang menopang praktik memberi. Dalam konteks Indonesia, filantropi tidak berdiri semata sebagai tindakan individual, melainkan hadir sebagai bagian dari solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan komunitas. Pola memberi melalui bantuan langsung, lembaga keagamaan, maupun organisasi sosial menunjukkan bahwa filantropi di Indonesia memiliki hubungan erat dengan nilai gotong royong, kewajiban moral-keagamaan, serta kepedulian terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, filantropi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk modal

² Charities Aid Foundation, World Giving Report 2025 (London: Charities Aid Foundation, 2025), hlm. 10-13.

sosial masyarakat sipil yang berperan penting dalam menopang jaring pengaman sosial dan memperkuat keberdayaan komunitas.

Berangkat dari temuan tersebut, filantropi atau kedermawanan sosial dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang memiliki dimensi etis, kultural, dan struktural. Secara mendasar, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik yang dilandasi oleh kesadaran etis terhadap sesama.³ Manifestasi filantropi dapat hadir dalam beragam bentuk, mulai dari pemberian bantuan langsung yang bersifat karitatif hingga upaya terorganisasi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, praktik filantropi berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam menopang jaring pengaman sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta mendorong inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Kemunculan dan perkembangan filantropi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari latar belakang keagamaan masyarakat. Dalam berbagai tradisi agama tindakan memberi dipahami bukan hanya sebagai ekspresi moral individual, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang membutuhkan.⁴ Pada fase awal perkembangannya, praktik filantropi kerap dilekatkan pada penyebaran nilai-nilai keagamaan melalui pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam realitas sosial Indonesia yang didominasi oleh pemeluk Islam, kondisi tersebut turut mendorong berkembangnya filantropi Islam sebagai bagian dari praktik sosial-keagamaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam perkembangannya, filantropi Islam di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Praktik filantropi yang semula lebih banyak bersifat tradisional, individual, religius, dan berjangka pendek, secara bertahap mengalami

³ Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission* (Bloomington: Indiana University Press, 2008), hlm. 5-8.

⁴ Sulkifli, "Filantropi Islam dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (2018), hlm 1-12.

⁵ Yulianti, Khusnul N. Afiah, Naufal C. Pamungkas, Dwi A. P. Berlianti, dan Rafi S. Aulia, "Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (2022), hlm. 36-45.

transformasi ke arah filantropi modern.⁶ Filantropi modern tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan pada perubahan institusional dan sistemik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.⁷ Dengan kata lain, orientasi filantropi tidak lagi berhenti pada pemberian bantuan karitatif, melainkan bergerak menuju penguatan kapasitas masyarakat agar mampu membangun kemandirian sosial dan ekonomi.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam modernis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan gerakan filantropi Islam. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dikenal melalui semangat *dakwah bil hal*, yaitu dakwah melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan kemanusiaan. Praktik filantropi Muhammadiyah tidak hanya mencerminkan tindakan memberi, tetapi juga memperlihatkan bentuk aktivisme sosial-keagamaan yang berusaha menjawab persoalan umat secara rasional, terorganisasi, dan berkelanjutan.⁸ Etos ini sejalan dengan paradigma "melayani umat" sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Latief, yaitu bahwa kedermawanan sosial dalam Muhammadiyah mengalami transformasi dari aksi karitatif individual menjadi kerja kemanusiaan yang terlembaga, sistematis, dan memiliki orientasi kesejahteraan sosial.⁹

Ajaran Al-Ma'un menjadi salah satu fondasi normatif yang menjelaskan mengapa filantropi Muhammadiyah tidak berhenti pada aktivitas memberi, tetapi berkembang menjadi praksis sosial yang berorientasi pada pembebasan dan pelayanan terhadap kelompok lemah. Melalui penafsiran KH. Ahmad Dahlan atas Q.S. Al-Ma'un, keberagamaan tidak dipahami sebatas kesalehan ritual, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan

⁶ Ali Romdhoni, "Filantropi Islam di Indonesia: Tantangan dan Potensi," *Jurnal Bimas Islam* 4, no. 2 (2022), hlm. 279-308, <https://doi.org/10.37302/jbi.v4i2.460>.

⁷ Ibid., hlm. 283.

⁸ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, eds., *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 1-10.

⁹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 153-187.

penyantunan terhadap fakir miskin. Dalam konteks ini, *Ajaran Al-Ma'un* berfungsi sebagai etika sosial yang menghubungkan iman, ibadah, dan tanggung jawab kemanusiaan, sehingga amal sosial Muhammadiyah dapat dibaca sebagai ekspresi keagamaan yang terorganisasi sekaligus berpihak pada keadilan sosial.¹⁰

Dalam ekosistem Muhammadiyah, praktik kedermawanan berjalan melalui dua jalur yang saling menguatkan, yaitu jalur formal dan informal. Pada jalur formal, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikoordinasikan melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki kedudukan penting karena merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.¹¹ Sementara itu, infak dan sedekah menjadi bentuk kedermawanan sukarela yang memberikan ruang lebih luas bagi umat Islam untuk mengekspresikan kepedulian sosialnya. LAZISMU memanfaatkan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar untuk membangun kepercayaan muzaki dan mengelola dana umat secara lebih akuntabel.¹² Namun, di luar struktur formal tersebut, semangat filantropi Muhammadiyah juga hidup dalam praktik keseharian warga di tingkat akar rumput. Pada level ini, filantropi tidak selalu hadir melalui lembaga resmi, tetapi tumbuh secara organik melalui jaringan sosial, kedekatan warga, relasi keagamaan, dan kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitar.

Salah satu ruang sosial yang memungkinkan praktik filantropi akar rumput tersebut diamati secara konkret adalah lingkungan sekitar pasar tradisional. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi tempat berlangsungnya transaksi material, tetapi juga sebagai ruang sosial-spasial tempat berbagai aktor lokal bertemu,

¹⁰ Andri Gunawan, "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018), hlm. 161-178, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>.

¹¹ Nurodin Usman, Agus Miswanto, and Subur Msi, *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: Total Quality Management Approach (TQM)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 20-35.

¹² Hartato Rianto, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023), hlm. 1335-1344.

berinteraksi, membangun jaringan, dan membentuk kepercayaan. Dalam kehidupan pasar yang dinamis dan sering kali diwarnai ketidakpastian ekonomi, modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma bersama menjadi penopang penting bagi kehidupan komunitas. Ketika ruang pasar bersentuhan dengan jaringan warga keagamaan yang memiliki kesamaan nilai dan afiliasi ideologis, praktik filantropi yang lahir di dalamnya tidak hanya menjadi tindakan memberi, tetapi juga berkembang menjadi praktik sosial-keagamaan lokal yang berupaya memperkuat solidaritas masyarakat sekitar.

Fenomena tersebut tampak dalam aktivitas warga Persyarikatan Muhammadiyah Abadijaya di sekitar kawasan Pasar Agung, Kota Depok. Di kawasan ini, praktik filantropi memiliki karakter sosial tersendiri karena tidak digerakkan oleh lembaga amal zakat formal perkotaan. Praktik tersebut justru tumbuh melalui inisiatif swadaya warga Muhammadiyah bersama organisasi otonom perempuannya, Aisyiyah. Aktivitas filantropi ini bertumpu pada Masjid Jami' Al-Bahar dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Pasar Agung sebagai ruang sosial-keagamaan sekaligus pusat pelayanan masyarakat.

Aktor dalam gerakan ini tidak hanya hadir sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah Abadijaya, tetapi juga sebagai warga yang tinggal, beraktivitas, dan memiliki kedekatan sosial dengan kawasan Pasar Agung. Kedekatan tersebut membuat praktik filantropi yang mereka jalankan tumbuh dari relasi sehari-hari dengan jamaah masjid, orang tua murid, anak-anak, warga sekitar, serta kelompok rentan yang membutuhkan bantuan. Karena itu, kegiatan filantropi yang berlangsung tidak terbatas pada komunitas pasar, tetapi juga menjangkau masyarakat sekitar secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa filantropi akar rumput Persyarikatan Muhammadiyah Abadijaya merupakan praktik sosial-keagamaan yang lahir dari keterikatan warga dengan lingkungan tempat mereka hidup, berinteraksi, dan melayani.

Praktik filantropi Muhammadiyah Abadijaya di sekitar Pasar Agung tidak hanya dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan memberi bantuan, tetapi juga sebagai tindakan sosial Muhammadiyah. Praktik tersebut disebut sebagai tindakan

sosial karena mengandung makna subjektif bagi para aktornya, yaitu sebagai bentuk ibadah, pengabdian, *dakwah bil hal*, dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tindakan tersebut juga diarahkan kepada orang lain, seperti jamaah masjid, anak-anak, orang tua murid, duafa, janda, pemulung, warga kontrakan, serta kelompok rentan lainnya di lingkungan Pasar Agung. Oleh karena itu, filantropi Muhammadiyah dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan sosial berbasis nilai yang lahir dari ajaran Al-Ma'un, keterlibatan organisasi, dan kedekatan sosial warga Muhammadiyah dengan masyarakat lokal.

Secara teoritis, praktik filantropi Muhammadiyah Abadijaya dapat dibaca melalui konsep *Inner-worldly asceticism* yang dikemukakan Max Weber. Dalam tradisi sosiologi klasik, Max Weber menjelaskan fenomena ketika keyakinan keagamaan mendorong individu untuk aktif dalam urusan dunia secara disiplin, rasional, hemat, dan memandang kerja sebagai panggilan moral melalui konsep *Inner-worldly asceticism* atau *Inner-worldly asceticism*.¹³ Konsep ini menjelaskan bagaimana keyakinan keagamaan tidak mendorong seseorang menjauh dari kehidupan dunia, melainkan justru membentuk etos tindakan yang disiplin, rasional, hemat, dan berorientasi pada kerja sebagai panggilan moral. Dalam kerangka tersebut, aktivitas sosial-keagamaan tidak semata dipahami sebagai bentuk kebaikan spontan, tetapi sebagai bagian dari penghayatan keagamaan yang diwujudkan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, filantropi akar rumput Muhammadiyah Abadijaya dapat dipahami sebagai ekspresi dari etos keagamaan yang menempatkan kerja sosial, pelayanan umat, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral di dunia.

Penggunaan konsep *Inner-worldly asceticism* dalam penelitian ini diletakkan sebagai perangkat analisis sosiologis untuk membaca hubungan antara nilai agama dan tindakan duniawi. Konsep ini tidak digunakan untuk menyamakan Muhammadiyah dengan etika Protestan dalam konteks Barat, melainkan sebagai tipe ideal untuk memahami bagaimana keyakinan keagamaan dapat membentuk etos tindakan yang

¹³ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. Talcott Parsons (London: Routledge, 1930), hlm. 95-181.

disiplin, rasional, sederhana, dan berorientasi pada kerja sosial. Dalam konteks Muhammadiyah, etos tersebut tampak bukan dalam dorongan akumulasi kapital, tetapi dalam pelembagaan amal saleh melalui masjid, pendidikan, pengajian, bantuan sosial, dan pelayanan umat. Pembacaan ini sejalan dengan studi Sukidi mengenai asketisme duniawi dalam tradisi Muslim reformis, serta kajian Asep Suryana tentang Muhammadiyah lokal di Depok yang menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat bekerja melalui keterlekatan sosial warga dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* dalam penelitian ini dipahami sebagai lensa sosiologis untuk membaca bagaimana agama mendorong aktor Muhammadiyah tetap aktif di dunia, tetapi dengan orientasi amal, kebermanfaatan, dan kemaslahatan sosial.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas filantropi Islam dan Muhammadiyah, sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek kelembagaan makro, tata kelola lembaga amal, serta manajemen filantropi formal. Berbagai studi telah menganalisis model tata kelola lembaga filantropi Islam, profesionalisasi amal, maupun implementasi *good amal governance* pada lembaga zakat.¹⁴ Kajian-kajian tersebut penting karena menunjukkan bagaimana filantropi Islam mengalami institusionalisasi dan modernisasi. Namun, perhatian terhadap bagaimana etos "melayani umat" diproduksi secara harian di tingkat ranting atau akar rumput masih relatif terbatas, terutama dalam konteks komunitas lokal yang memiliki keterlekatan sosial dengan ruang tertentu seperti pasar tradisional.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan praktik filantropi Muhammadiyah Abadijaya di sekitar Pasar Agung dalam tingkat akar rumput sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini tidak hanya melihat filantropi sebagai kegiatan penghimpunan dan distribusi bantuan, tetapi sebagai medan praksis tempat nilai keagamaan, keterikatan sosial, dan etos tindakan bertemu. *Ajaran Al-Ma'un* diposisikan sebagai sumber etis internal yang mendorong kepedulian terhadap kelompok lemah, Muhammadiyah selaku aktor yang melakukan filantropi, dan *Inner-worldly asceticism* Weber digunakan sebagai lensa interpretatif

¹⁴ Nurodin Usman, Agus Miswanto, and Subur Msi, Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam, op. cit., hlm. 20-35.

untuk membaca etos tindakan para aktor. Penggunaan konsep *Inner-worldly asceticism* dalam penelitian ini memiliki batasan analitis karena konsep tersebut berasal dari pemikiran Max Weber dalam konteks historis Barat, khususnya ketika menjelaskan hubungan antara etika keagamaan, kerja, disiplin hidup, dan tindakan duniawi. Konsep ini tidak digunakan untuk menyamakan Muhammadiyah dengan etika Protestan, melainkan sebagai tipe ideal untuk membaca etos tindakan keagamaan dalam tradisi Islam-Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini, *Inner-worldly asceticism* dipahami sebagai bentuk keberagamaan yang tidak menarik aktor dari kehidupan dunia, tetapi justru mendorong keterlibatan aktif dalam kerja sosial, pendidikan, pengajian, filantropi, dan pelayanan masyarakat. Pada konteks Muhammadiyah, etos kerja dan kedisiplinan tidak diarahkan pada akumulasi kapital, melainkan pada kemaslahatan, pelayanan umat, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta pengamalan ajaran Al-Ma'un. Pembacaan ini diperkuat oleh Sukidi yang menekankan bahwa Islam Indonesia, khususnya tradisi Muslim reformis seperti Muhammadiyah, perlu dipahami secara kontekstual sesuai pengalaman historis dan sosialnya sendiri. Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* dalam penelitian ini digunakan untuk membaca etos kerja sosial Muhammadiyah yang rasional, disiplin, sederhana, dan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis praktik filantropi Muhammadiyah sebagai fenomena sosial yang bertumpu pada nilai keagamaan dan diwujudkan dalam tindakan kolektif masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, nilai Al-Ma'un dipahami sebagai landasan etik yang dapat membentuk orientasi tindakan, pola relasi sosial, serta solidaritas dalam kehidupan komunitas. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana nilai keagamaan bekerja dalam praktik filantropi akar rumput. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik filantropi Muhammadiyah di lingkungan sekitar Pasar Agung?

2. Bagaimana tipe ideal *inner-worldly asceticism* Max Weber menjelaskan etos pengabdian dalam praktik filantropi Muhammadiyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan konkret sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi secara mendalam bentuk-bentuk praktik filantropi akar rumput oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah Abadijaya di lingkungan sekitar Pasar Agung, Kota Depok.
2. Untuk menganalisis praktik filantropi akar rumput tersebut melalui tipe ideal *Inner-worldly asceticism* Max Weber.

1.4 Signifikansi Penelitian

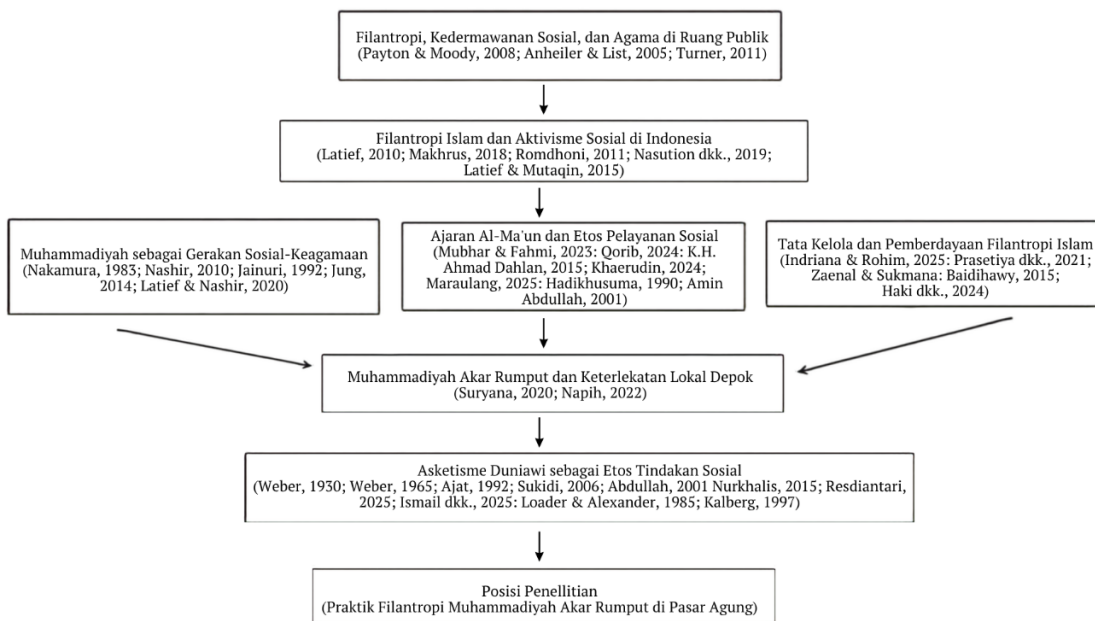
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang signifikan bagi beberapa pihak:

1. Akademis: Penelitian ini menyumbangkan data empiris mengenai dinamika aktivisme sosial dan pembentukan solidaritas dalam konteks filantropi berbasis keagamaan di Indonesia, khususnya terkait bagaimana Ajaran Al-Ma'un dipraktikkan di level akar rumput.
2. Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Muhammadiyah dan organisasi sejenis untuk merancang program filantropi yang tidak sekadar karitatif, tetapi juga memiliki pengelolaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
3. Sosial: Penelitian ini menggambarkan pengalaman penerima manfaat serta menegaskan bahwa mereka bukan sekadar objek santunan, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang turut membentuk keberlanjutan relasi kepedulian dan praktik filantropi di lingkungan sekitar Pasar Agung.

1.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik filantropi Muhammadiyah pada tingkat akar rumput dengan mengkaji sejumlah aspek yang berkaitan dengan topik tersebut. Peneliti melakukan telaah terhadap 38 literatur yang relevan dan kredibel, yang terdiri atas 14 buku dan bab buku, 12 artikel jurnal internasional, 10 artikel jurnal nasional, serta 2 karya ilmiah akademik berupa tesis dan disertasi. Penelusuran literatur ini dilakukan untuk membangun landasan teoretis yang kuat, mengidentifikasi kebaruan penelitian agar terhindar dari pengulangan studi sebelumnya, serta memperkuat analisis mengenai filantropi Muhammadiyah di lingkungan Pasar Agung. Dengan pemetaan tersebut, penelitian ini dapat menempatkan dirinya dalam kajian sosiologi agama, filantropi Islam, gerakan sosial Muhammadiyah, dan *Inner-worldly asceticism*.

Skema 1.5 Tinjauan Literatur



Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Gambar di atas merupakan skema 1.5 yang memberikan gambaran posisi telaah pustaka pada penelitian ini. Penelitian ini melakukan telaah pustaka terhadap sejumlah literatur yang relevan untuk memahami praktik filantropi Muhammadiyah pada tingkat akar rumput. Literatur yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai pijakan untuk membaca hubungan antara nilai agama,

tindakan sosial, organisasi, dan keterlekatan lokal. Secara umum, telaah pustaka ini disusun berdasarkan kedekatan topik, yaitu konsep filantropi, filantropi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan, Ajaran Al-Ma'un, tata kelola filantropi, *Inner-worldly asceticism*, serta konteks lokal Muhammadiyah di Depok. Susunan ini membantu penelitian untuk melihat bagaimana praktik filantropi tidak hanya hadir sebagai tindakan memberi, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang dibentuk oleh nilai, jaringan, dan institusi. Dengan demikian, telaah pustaka ini menjadi dasar untuk menunjukkan posisi penelitian dalam kajian sosiologi agama, filantropi, dan gerakan sosial Islam.

Kajian tentang filantropi secara umum menjadi pijakan awal untuk memahami praktik memberi sebagai tindakan sosial yang memiliki dimensi moral dan publik. Payton dan Moody menjelaskan filantropi sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik, sehingga filantropi tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab sosial terhadap kehidupan bersama.¹⁵ Anheier dan List memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan filantropi dalam ruang masyarakat sipil, sektor non-profit, dan organisasi sukarela yang berada di antara negara dan pasar.¹⁶ Dengan demikian, filantropi dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik sosial yang menghubungkan kepedulian, organisasi, dan keterlibatan warga dalam menjawab persoalan masyarakat.

Dalam konteks Islam Indonesia, filantropi memiliki karakter yang tidak dapat dilepaskan dari nilai keagamaan dan perkembangan kelembagaan umat. Hilman Latief dalam *Melayani Umat* menunjukkan bahwa filantropi Islam kaum modernis bergerak dari tindakan karitatif menuju kerja pelayanan umat yang lebih terorganisasi dan memiliki orientasi kesejahteraan sosial.¹⁷ Makhrus menjelaskan bahwa filantropi Islam dapat menjadi bagian dari aktivisme pemberdayaan masyarakat ketika dana

¹⁵ Robert L. Payton dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*, op. cit., hlm. 5-8.

¹⁶ Helmut K. Anheier dan Regina A. List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* (London: Routledge, 2005), hlm. 200-205.

¹⁷ Hilman Latief, *Melayani Umat*, op. cit., hlm. 153-187.

sosial keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga.¹⁸ Ali Romdhoni menegaskan bahwa filantropi Islam di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan dalam aspek pengelolaan, regulasi, dan perubahan sosial masyarakat.¹⁹ Hasyimsyah Nasution, Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir menunjukkan bahwa pemberdayaan filantropi dapat meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah ketika praktik memberi tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi diarahkan pada penguatan kehidupan sosial.²⁰ Melalui literatur tersebut, filantropi Islam dapat dibaca sebagai praktik sosial-keagamaan yang bergerak dari kepedulian individual menuju kerja kolektif yang lebih terorganisasi.

Literatur lain memperlihatkan bahwa filantropi Islam juga berkembang dalam bentuk kerja kemanusiaan yang lebih luas. Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin melalui *Islam dan Urusan Kemanusiaan* menempatkan filantropi dalam kaitannya dengan konflik, perdamaian, dan urusan kemanusiaan, sehingga filantropi Islam tidak hanya dipahami sebagai kepedulian internal umat, tetapi juga sebagai respons terhadap persoalan sosial yang lebih luas.²¹ Zakiyuddin Baidhawiy memperlihatkan bahwa Muhammadiyah dalam kerja kebencanaan dapat dibaca sebagai organisasi berbasis agama yang membangun respons sosial melalui prinsip kemanusiaan dan pelayanan yang tidak diskriminatif.²² Ubay Haki, Moh. Nurhakim, dan Saiful Amin menunjukkan bahwa Muhammadiyah juga berupaya memperkuat pengaruh globalnya melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan penyebaran nilai Islam moderat.²³ Hilman Latief dan Haedar Nashir menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak hanya aktif di

¹⁸ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm. 23-35.

¹⁹ Ali Romdhoni, *Filantropi Islam di Indonesia: Tantangan dan Potensi*, op. cit., hlm. 279-308.

²⁰ Hasyimsyah Nasution, Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir, "Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia," *MIQOT*, Vol. 43, No. 2 (2019), hlm. 278-299.

²¹ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, op. cit., hlm. 1-10.

²² Zakiyuddin Baidhawiy, "The Role of Faith-Based Organization in Coping with Disaster Management and Mitigation: Muhammadiyah's Experience," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 167-194.

²³ Ubay Haki, Moh. Nurhakim, dan Saiful Amin, "Strengthening Muhammadiyah's Global Influence: Challenges and Strategic Recommendations for Promoting Moderate Islamic Values," *AMCA Journal of Community Development*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 68-75.

tingkat lokal dan nasional, tetapi juga terlibat dalam isu kemanusiaan global melalui jaringan, amal usaha, dan aktivisme internasional.²⁴ Literatur-literatur ini membantu menempatkan Muhammadiyah sebagai aktor masyarakat sipil Islam yang bergerak melalui pelayanan sosial, organisasi, dan kerja kemanusiaan.

Kajian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan menjadi penting karena filantropi dalam organisasi ini lahir dari sejarah dan ideologi gerakan yang panjang. Mitsuo Nakamura memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tumbuh melalui kehidupan warga, keluarga, pendidikan, ekonomi lokal, dan praktik keagamaan sehari-hari, sehingga kekuatan gerakan ini tidak hanya terletak pada elite organisasi, tetapi juga pada komunitas lokal.²⁵ Haedar Nashir menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam yang memadukan pemurnian ajaran dengan orientasi kemajuan sosial.²⁶ Achmad Jainuri menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki peran sosial-keagamaan yang penting dalam membentuk perubahan keagamaan, pendidikan, dan kehidupan sosial umat Islam Indonesia.²⁷ Eunsook Jung memperlihatkan bahwa Muhammadiyah menjaga diri sebagai organisasi sosial-keagamaan dengan menempatkan misi dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial di atas kepentingan politik praktis.²⁸ Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dipahami secara sosiologis sebagai aktor kolektif yang mengorganisasi nilai keagamaan menjadi kerja sosial yang berkelanjutan.

Akar pemikiran sosial Muhammadiyah juga dapat ditelusuri melalui figur K.H. Ahmad Dahlan dan para tokoh awal gerakan. Buku *K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923)* menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan memiliki peran penting dalam modernisasi

²⁴ Hilman Latief dan Haedar Nashir, "Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020)," *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 39, No. 2 (2020), hlm. 290-309.

²⁵ Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 1-25.

²⁶ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 31-35.

²⁷ Achmad Jainuri, *The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia: A Socio-Religious Study* (Tesis Master of Arts, Institute of Islamic Studies, McGill University, 1992), hlm. 1-20.

²⁸ Eunsook Jung, "Islamic Organizations and Electoral Politics in Indonesia: The Case of Muhammadiyah," *South East Asia Research*, Vol. 22, No. 1 (2014), hlm. 73-86.

pendidikan, penguatan kaum perempuan, dan pembentukan etos kemajuan umat.²⁹ Khaerudin menjelaskan bahwa pemikiran Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam berangkat dari upaya memadukan pendidikan tradisional dan pendidikan modern agar umat Islam mampu menghadapi perubahan zaman.³⁰ Maraulang memperkuat pembacaan tersebut dengan menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah membawa transformasi pendidikan melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum, pendidikan karakter, serta perluasan akses pendidikan.³¹ Djarnawi Hadikusuma melalui kisah Ki Bagus Hadikusumo memperlihatkan dimensi keteladanan, pengorbanan, dan kepemimpinan moral dalam tradisi Muhammadiyah.³² Literatur ini memperlihatkan bahwa etos pelayanan sosial Muhammadiyah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berakar pada sejarah pembaruan, pendidikan, dan pembentukan aktor sosial yang berorientasi pada kemajuan masyarakat.

Ajaran Al-Ma'un menjadi salah satu basis penting untuk memahami orientasi sosial dalam gerakan Muhammadiyah. Muhammad Zulkarnain Mubhar dan Zul Fahmi menjelaskan bahwa Muhammadiyah memaknai Surah Al-Ma'un sebagai dasar gerakan filantropi yang menuntut keberpihakan kepada kelompok lemah dan mendorong tindakan sosial yang nyata.³³ Mohammad Qorib memperlihatkan bahwa orientasi kemanusiaan Muhammadiyah berangkat dari nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang dilembagakan dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta respons terhadap krisis sosial.³⁴ M. Amin Abdullah menempatkan pengalaman Muhammadiyah dalam mendorong masyarakat sipil sebagai bagian dari kontribusi

²⁹ Museum Kebangkitan Nasional, K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 12-25.

³⁰ Khaerudin, "Telaah Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam Memodernisasi Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 4 (2024), hlm. 304-316.

³¹ Maraulang, "KH. Ahmad Dahlan and the Muhammadiyah Movement: Trailblazers of Educational Transformation in Indonesia," *International Journal of Asian Education*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 164-175.

³² Djarnawi Hadikusuma, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan, dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo* (Yogyakarta: Persatuan, 1990), hlm. 1-20.

³³ Muhammad Zulkarnain Mubhar dan Zul Fahmi, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Filantropi: Pemaknaan Surah Al-Ma'un," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 78-85.

³⁴ Mohammad Qorib, "Muhammadiyah Humanitarian Theology: Responding to Contemporary Global Crises," *International Journal of Arts and Social Science*, hlm. 1-15.

Islam terhadap kehidupan publik dan pembangunan sosial.³⁵ Buku *30 Tahun Muhammadiyah Cabang Depok* memberi pijakan historis lokal untuk membaca bagaimana Muhammadiyah di Depok membangun dirinya melalui sejarah organisasi, amal usaha, dan keterlibatan warga.³⁶ Dalam pembacaan sosiologis, Ajaran Al-Ma'un tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi sebagai sumber nilai yang membentuk orientasi tindakan, solidaritas, dan pelebagaan kerja sosial dalam Muhammadiyah.

Literatur tentang tata kelola filantropi menunjukkan bahwa filantropi Islam modern semakin bergerak ke arah profesionalisasi dan penguatan kelembagaan. Mae Mona Indriana dan Ade Nur Rohim meneliti lembaga amal zakat berbasis masjid dan menunjukkan pentingnya good amal governance dalam meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan zakat.³⁷ Benny Prasetya, Heri Rifhan Halili, M. Alvi Syahrin, dan M. Arifin menunjukkan bahwa LAZISMU dapat mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan, pendampingan, dan usaha produktif agar penerima manfaat menjadi lebih mandiri.³⁸ Zaenal dan Oman Sukmana menyoroti pola pengelolaan dana filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat melalui studi pada LAZISMU Malang.³⁹ Kajian-kajian ini penting karena memperlihatkan arah modernisasi filantropi Islam melalui manajemen organisasi, akuntabilitas, dan pemberdayaan. Namun, fokus utama kajian tersebut masih cenderung berada pada lembaga formal, sehingga ruang untuk membaca praktik filantropi pada level komunitas lokal masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

³⁵ M. Amin Abdullah, "Muhammadiyah's Experience in Promoting Civil Society on the Eve of the 21st Century," dalam Mitsuo Nakamura, Sharon Siddique, dan Omar Farouk Bajunid, eds., *Islam and Civil Society in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2001), hlm. 47-60.

³⁶ H. Nawawi Napih, *30 Tahun Muhammadiyah Cabang Depok (1952-1982): Asal Usul, Tantangan, dan Pengembangan* (Depok: Semesta Irfani Mandiri, 2022), hlm. 1-15.

³⁷ Mae Mona Indriana dan Ade Nur Rohim, "Analysis of Good Amil Governance Implementation in Mosque-Based Amil Zakat Institution," *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 6-29.

³⁸ Benny Prasetya, Heri Rifhan Halili, M. Alvi Syahrin, dan M. Arifin, "Lazismu Philanthropy Potential in The Empowerment of Mustahiq's Economic and Welfare: A Case Study in Probolinggo, Jember, and Pasuruan," *Afkaruna*, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 336-361.

³⁹ Zaenal dan Oman Sukmana, "Patterns of Islamic Philanthropy Fund Management in Community Empowerment in Malang: Studies in Lazis Muhammadiyah Malang," (2022), hlm. 1-12.

Untuk membaca dimensi etos tindakan para aktor, penelitian ini bertumpu pada gagasan Max Weber tentang *Inner-worldly asceticism*. Weber dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* menjelaskan bahwa etika keagamaan dapat membentuk tindakan yang disiplin, rasional, hemat, dan memaknai kerja sebagai panggilan moral.⁴⁰ Dalam *The Sociology of Religion*, Weber juga menunjukkan bahwa agama dapat membentuk orientasi tindakan sosial melalui etika, rasionalisasi, dan hubungan antara keyakinan dengan perilaku manusia.⁴¹ Ajat Sudrajat membantu membuka kemungkinan membaca tesis Weber dalam konteks Islam Indonesia, terutama pada kelompok pembaru yang memperlihatkan etos kerja dan rasionalitas keagamaan tertentu.⁴² Sukidi memperkuat pembacaan tersebut dengan membandingkan pandangan Weber tentang Islam dengan pengalaman Muslim reformis di Indonesia, khususnya dalam tradisi Muhammadiyah.⁴³ Posisi Sukidi dalam penelitian ini menjadi penting sebagai jembatan untuk mengontekstualisasikan Weber dalam tradisi Islam-Muhammadiyah. Weber digunakan untuk menyediakan tipe ideal mengenai hubungan antara agama, kerja, disiplin, dan tindakan duniawi, sedangkan Sukidi membantu membaca bagaimana corak tersebut dapat ditemukan dalam tradisi Muslim reformis Indonesia.

Beberapa literatur kontemporer juga membantu mengontekstualisasikan *Inner-worldly asceticism* dalam masyarakat Islam modern. Nurkhalis menjelaskan bahwa asketisme Islam tidak harus dipahami sebagai sikap menarik diri dari dunia, tetapi dapat dibaca sebagai zuhud moderat yang produktif dan partisipatif.⁴⁴ Offy Resdiantari menunjukkan bahwa *Inner-worldly asceticism* Weber dapat dikontekstualisasikan dalam masyarakat Islam modern Indonesia melalui organisasi seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad yang mewujudkan nilai agama dalam sekolah, rumah sakit, dan

⁴⁰ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, op. cit., hlm. 95-181.

⁴¹ Max Weber, *The Sociology of Religion*, terj. Ephraim Fischhoff (London: Methuen & Co. Ltd., 1965), hlm. 26-50.

⁴² Ajat Sudrajat, "Tesis Weber dan Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historiografis," *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 11, No. 1 (1992), hlm. 121-138.

⁴³ Sukidi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans," *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 17, No. 2 (2006), hlm. 195-205.

⁴⁴ Nurkhalis, "Positififikasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik dan Modern," *MIQOT*, Vol. 39, No. 1 (2015), hlm. 21-43.

pelayanan sosial.⁴⁵ Mustafiril Ismail, Nindiyawati Dedu, Mildayanti Singgima, Tiara Jumadil, dan Rudy Harold menegaskan bahwa pemikiran Weber tetap relevan untuk membaca rasionalisasi, etika keagamaan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan beragama modern.⁴⁶ Colin Loader dan Jeffrey C. Alexander membantu memperluas pembacaan terhadap Weber melalui kajian tentang gereja, sekte, dan jalur rasionalisasi dalam masyarakat Amerika Utara.⁴⁷ Stephen Kalberg juga berguna untuk memahami hubungan antara nilai, keyakinan, dan pembentukan budaya kewargaan dalam pemikiran Weber dan Tocqueville.⁴⁸ Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* dalam penelitian ini dipakai sebagai perangkat sosiologis untuk membaca bagaimana nilai agama dapat mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial.

Konteks lokal Depok menjadi bagian penting karena penelitian ini tidak hanya membahas Muhammadiyah sebagai organisasi besar, tetapi juga sebagai gerakan sosial-keagamaan yang hidup dalam ruang sosial tertentu. Asep Suryana dalam disertasinya menunjukkan bahwa gerakan lokal Muhammadiyah di kawasan post-suburban Depok dapat dibaca sebagai mekanisme membangun keadilan kota dari bawah melalui gerakan sosial-keagamaan.⁴⁹ Asep Suryana juga menulis tentang kontestasi aspirasi organisasi Islam lokal di kota penyangga Jakarta, yang membantu memahami bagaimana Muhammadiyah lokal bergerak dalam ruang urban yang terus berubah.⁵⁰ Kajian Asep Suryana juga memperkenalkan gagasan insiderness untuk menggambarkan rasa menjadi bagian dari masyarakat setempat yang tumbuh melalui

⁴⁵ Offy Resdiantari, "Kontekstualisasi Asketisme Max Weber dalam Masyarakat Islam Moderen di Indonesia," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm. 791-801.

⁴⁶ Mustafiril Ismail, Nindiyawati Dedu, Mildayanti Singgima, Tiara Jumadil, dan Rudy Harold, "Sosiologi Agama dari Sudut Pandang Max Weber: Rasionalisasi, Etika, dan Solidaritas Sosial dalam Kehidupan Keagamaan Modern," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 4 (2025), hlm. 6778-6784.

⁴⁷ Colin Loader dan Jeffrey C. Alexander, "Max Weber on Churches and Sects in North America: An Alternative Path toward Rationalization," *Sociological Theory*, Vol. 3, No. 1 (1985), hlm. 1-6.

⁴⁸ Stephen Kalberg, "Tocqueville and Weber on the Sociological Origins of Citizenship: The Political Culture of American Democracy," *Citizenship Studies*, Vol. 1, No. 2 (1997), hlm. 199-222.

⁴⁹ Asep Suryana, *Membangun Keadilan Kota dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah di Kawasan Post-Suburban Depok* (Disertasi Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 285-294.

⁵⁰ Asep Suryana, "Multiple Aspirational Contestation of Islamic Mass Organization in Indonesia: A Study of Local Muhammadiyah in Metropolitan Jakarta's Buffer City," *Jurnal Sosiologi Walisongo*, hlm. 285-286.

kedekatan sosial, keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari, dan relasi kepercayaan warga.⁵¹ Gagasan insiderness relevan sebagai konteks pendukung untuk membaca keterlekatan sosial Muhammadiyah dengan masyarakat lokal, tetapi tidak ditempatkan sebagai salah satu konsep dalam kerangka konseptual penelitian ini. Dengan demikian, konteks lokal membantu memperlihatkan bahwa filantropi akar rumput dapat bekerja melalui kedekatan sosial, rasa memiliki, dan relasi keseharian.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tentang filantropi Islam dan Muhammadiyah telah banyak membahas aspek konseptual, sejarah gerakan, Ajaran Al-Ma'un, tata kelola lembaga amil, pendidikan, kebencanaan, dan kerja kemanusiaan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih banyak bergerak pada level makro-organisasi, lembaga formal, atau gerakan Muhammadiyah secara umum. Penelitian ini mengambil posisi yang lebih mikro dengan melihat bagaimana etos "melayani umat" diproduksi dalam praktik sosial komunitas Muhammadiyah pada tingkat akar rumput. Fokus tersebut penting karena filantropi akar rumput tidak selalu dapat dipahami hanya melalui lembaga resmi, tetapi juga melalui relasi sosial, organisasi lokal, dan tindakan kolektif warga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan membaca filantropi Muhammadiyah akar rumput bentuk pelayanan umat *Inner-worldly asceticism* Weberian dalam ruang sosial lokal.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun melalui lima konsep yang saling berhubungan, yaitu filantropi, Muhammadiyah, Ajaran Al-Ma'un, *Inner-worldly asceticism*, dan *Rational Ordering of Life*. Filantropi digunakan untuk membaca bentuk tindakan memberi, membantu, dan melayani. Muhammadiyah digunakan untuk memahami organisasi sebagai aktor kolektif yang, bersama Aisyiyah dalam konteks penelitian, mengorganisasi praktik tersebut. Ajaran Al-Ma'un menjelaskan dasar etik kepedulian; *Inner-worldly asceticism* membaca etos tindakan

⁵¹ Asep Suryana, *Membangun Keadilan Kota dari Bawah*, op. cit., hlm. 330-338.

keagamaan yang aktif di dunia; sedangkan *Rational Ordering of Life* menjelaskan proses penataan nilai dan tindakan menjadi praktik yang teratur, terarah, dan berkelanjutan. Kelima konsep tersebut tidak ditempatkan secara hierarkis, melainkan memiliki fungsi analitis yang berbeda dan saling melengkapi dalam menjelaskan praktik filantropi Muhammadiyah di Pasar Agung.

1.6.1 Filantropi

Filantropi merupakan konsep yang merujuk pada tindakan memberi, membantu, dan melayani untuk kepentingan sosial. Dalam kajian sosial, filantropi tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan material, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian yang lahir dari nilai moral dan tanggung jawab sosial. Menurut Hilman Latief, filantropi dalam tradisi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai kedermawanan sosial yang tidak berhenti pada tindakan karitatif individual, tetapi berkembang menjadi kerja pelayanan umat yang terlembaga, sistematis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁵² Sedangkan menurut Yulianti dkk. menjelaskan bahwa filantropi Islam di Indonesia memiliki posisi penting karena berkaitan dengan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan.⁵³ Dengan demikian, filantropi dapat dibaca sebagai praktik sosial yang menghubungkan aktor, nilai, dan kepentingan publik. Konsep ini penting karena memperlihatkan bahwa tindakan memberi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam hubungan sosial tertentu.

Filantropi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam merespons persoalan sosial. Persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran masyarakat sipil. Dalam konteks ini, Romdhoni melihat filantropi Islam sebagai salah satu potensi sosial yang dapat membantu pembangunan masyarakat, terutama

⁵² Hilman Latief, *Melayani Umat*, op. cit., hlm. 153-187.

⁵³ Yulianti dkk., "Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia," op. cit., hlm. 36-38.

ketika praktik memberi diarahkan pada penguatan kehidupan sosial.⁵⁴ Filantropi karena itu tidak hanya bekerja sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan kepedulian warga dengan kebutuhan masyarakat. Melalui filantropi, masyarakat membangun ruang solidaritas untuk saling menopang dalam menghadapi kerentanan sosial.

Dalam Islam, filantropi memiliki bentuk yang lebih terstruktur melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial karena berkaitan dengan distribusi sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan. Ridwan dan Hidayati menempatkan filantropi Islam sebagai bagian dari upaya pembangunan di Indonesia karena dana sosial keagamaan dapat diarahkan untuk kepentingan publik.⁵⁵ Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban memberi, tetapi juga tentang bagaimana nilai agama bekerja dalam membangun keadilan sosial. Praktik ini memperlihatkan bahwa agama memiliki peran dalam membentuk etika kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama.

Perkembangan filantropi Islam menunjukkan adanya perubahan dari praktik yang bersifat tradisional menuju bentuk yang lebih modern. Filantropi tradisional umumnya bersifat langsung, individual, dan berorientasi pada bantuan jangka pendek. Sementara itu, filantropi modern mulai menekankan pengelolaan kelembagaan, pendayagunaan dana, serta orientasi pemberdayaan sosial. Baidhawiy, dalam kajiannya tentang LAZISMU, menunjukkan bahwa filantropi Muhammadiyah bergerak ke arah pengelolaan yang lebih terorganisasi dan tidak hanya berhenti pada bantuan karitatif.⁵⁶ Perubahan ini menunjukkan bahwa filantropi dapat

⁵⁴ Ali Romdhoni, *Filantropi Islam di Indonesia: Tantangan dan Potensi*, op. cit., hlm. 279-281.

⁵⁵ Ridwan dan Sri Hidayati, *Filantropi Islam untuk Pembangunan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis* (LPDP, 2023), hlm. 4-7.

⁵⁶ Zakiyuddin Baidhawiy, "Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015), hlm. 387-390.

berkembang menjadi gerakan sosial yang memiliki struktur, strategi, dan tujuan perubahan sosial.

Filantropi juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Sulkifli menjelaskan bahwa filantropi Islam dapat berperan dalam pembangunan manusia ketika praktik memberi diarahkan pada pendidikan, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.⁵⁷ Dalam pengertian ini, filantropi tidak hanya menjadi respons terhadap kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat menjadi jalan untuk memperkuat kemandirian sosial. Bantuan sosial yang dikelola secara tepat dapat membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial lain. Oleh karena itu, filantropi memiliki potensi transformatif karena mampu mengubah posisi penerima bantuan dari sekadar objek santunan menjadi subjek yang lebih berdaya.

Dalam konteks organisasi keagamaan, filantropi dijalankan melalui nilai, jaringan sosial, dan struktur kelembagaan. Organisasi keagamaan memiliki kemampuan untuk mengubah nilai moral menjadi praktik sosial yang lebih teratur. Rianto menunjukkan bahwa lembaga filantropi berbasis organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pola pengelolaan yang berkaitan dengan kepercayaan publik dan jaringan sosial keagamaan.⁵⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa filantropi tidak hanya membutuhkan niat memberi, tetapi juga membutuhkan aktor kolektif yang mampu mengelola sumber daya. Dengan demikian, organisasi keagamaan dapat menjadi penghubung antara nilai agama, kepedulian sosial, dan praktik pelayanan masyarakat.

Filantropi Muhammadiyah memiliki karakter khas karena berada dalam tradisi gerakan Islam modernis. Muhammadiyah tidak hanya menempatkan filantropi sebagai tindakan memberi, tetapi juga sebagai

⁵⁷ Hartato Rianto, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," op. cit., hlm. 1335-1337.

⁵⁸ Ibid., hlm. 1335-1337.

bagian dari pelayanan umat. Qorib menjelaskan bahwa aktivitas sosial Muhammadiyah berangkat dari inspirasi nilai Islam yang dilembagakan melalui gerakan dan amal usaha.⁵⁹ Dalam hal ini, filantropi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai kerja sosial-keagamaan yang menggabungkan dakwah, pelayanan, dan organisasi. Karakter tersebut memperlihatkan bahwa filantropi Muhammadiyah tidak hanya bersifat spontan, tetapi memiliki dasar nilai dan bentuk kelembagaan yang kuat.

Filantropi Muhammadiyah juga dapat dibaca melalui bidang pendidikan. Hasanah dan Irna menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini di lingkungan TK ABA memiliki hubungan dengan nilai filantropi Muhammadiyah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam kurikulum dan praktik pendidikan.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa filantropi tidak selalu hadir dalam bentuk bantuan uang atau barang, tetapi juga dapat hadir melalui pelayanan pendidikan. Pendidikan menjadi bagian dari filantropi karena membuka akses, membentuk kapasitas, dan memberikan manfaat sosial jangka panjang. Dengan demikian, filantropi dalam Muhammadiyah dapat mencakup pelayanan sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

Selain melalui lembaga formal, filantropi juga dapat tumbuh melalui komunitas dan gerakan sosial lokal. Anam dkk. menjelaskan bahwa praktik filantropi Islam dapat mempererat kepedulian masyarakat karena melibatkan partisipasi sosial, rasa tanggung jawab, dan hubungan antaranggota komunitas.⁶¹ Dalam pengertian ini, filantropi tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara pemberi dan penerima, tetapi juga

⁵⁹ Muhammad Qorib, "Muhammadiyah and Humanitarian Theology," *International Journal of Arts and Social Science* 7, no. 1 (2024), hlm. 1-3.

⁶⁰ Amalia Uswatun Hasanah dan Irna, "Konsep Filantropi Muhammadiyah dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Deskriptif di TK ABA Jabodetabek," *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 16, no. 2 (2021), hlm. 78-81.

⁶¹ M. Zuhurul Anam, Ni'mah Fathika Ningrum, dan Hisyam Mashadi, "Praktik Filantropi Islam Mempererat Kepedulian Masyarakat dalam Organisasi Pelita Intan Muda Yogyakarta," *Jurnal Al-Kharaj* 4, no. 2 (2024), hlm. 82-86.

sebagai proses membangun solidaritas sosial. Praktik memberi dapat menciptakan ruang pertemuan, memperkuat relasi sosial, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, filantropi memiliki dimensi sosial yang lebih luas daripada sekadar distribusi bantuan.

Dalam penelitian ini, filantropi ditempatkan sebagai salah satu konsep untuk membaca praktik sosial-keagamaan yang berbasis nilai. Konsep filantropi digunakan bukan hanya untuk menjelaskan bentuk pemberian bantuan, tetapi juga untuk memahami bagaimana nilai agama, aktor kolektif, dan tanggung jawab sosial membentuk tindakan memberi. Indriana dan Rohim menekankan pentingnya tata kelola dan kepercayaan dalam lembaga filantropi berbasis masjid, yang menunjukkan bahwa filantropi membutuhkan akuntabilitas sosial agar dapat berjalan efektif.⁶² Dengan demikian, filantropi dalam kerangka konseptual ini dipahami sebagai tindakan sosial berbasis nilai yang menghubungkan kepedulian, organisasi, dan kepentingan publik. Pemahaman ini menjadi dasar untuk membaca filantropi bukan sekadar sebagai karitas, melainkan sebagai praktik sosial yang memiliki orientasi moral dan sosial.

1.6.2 Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modernis yang memiliki karakter sebagai gerakan sosial-keagamaan. Organisasi ini tidak hanya bergerak dalam ruang dakwah ritual, tetapi juga mengembangkan praktik sosial melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pembinaan masyarakat. Dalam kajian Hilman Latief dan Haedar Nashir, Muhammadiyah dipahami sebagai gerakan Islam modernis yang memiliki dinamika lokal sekaligus keterlibatan global dalam menjawab persoalan masyarakat.⁶³ Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai organisasi yang menghubungkan nilai keagamaan dengan kerja sosial yang

⁶² Mae Mona Indriana dan Ade Nur Rohim, *Analysis of Good Amil Governance Implementation in Mosque-Based Amil Zakat Institution*, op. cit., hlm. 6-9.

⁶³ Hilman Latief dan Haedar Nashir, "Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia," op. cit., hlm. 290-293.

terorganisasi. Posisi ini penting karena Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai lembaga dakwah, tetapi juga sebagai aktor kolektif dalam kehidupan masyarakat sipil.

Secara konseptual, Muhammadiyah dapat dibaca sebagai gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan tersebut tampak dari upaya Muhammadiyah menekankan pemurnian ajaran Islam, pendidikan modern, serta penguatan amal sosial. Haedar Nashir menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki watak tajdid, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan Islam agar agama dapat menjadi kekuatan pencerahan bagi kehidupan sosial.⁶⁴ Dengan watak tersebut, Muhammadiyah tidak menempatkan agama hanya sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai dasar untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, Muhammadiyah dapat dikonseptualisasikan sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada perubahan sosial.

Muhammadiyah juga dapat dipahami sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sebagai organisasi masyarakat, Muhammadiyah bergerak di luar struktur negara, tetapi memiliki peran penting dalam menyediakan layanan sosial dan membangun partisipasi warga. Latief dan Nashir menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjalankan berbagai aktivitas sosial melalui jaringan organisasi dan amal usaha yang luas.⁶⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengorganisasi nilai, sumber daya, dan tindakan kolektif. Dalam pengertian sosiologis, Muhammadiyah bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga aktor masyarakat sipil yang ikut membentuk kehidupan sosial.

Ciri penting Muhammadiyah adalah kemampuannya melembagakan nilai keagamaan ke dalam praktik sosial. Nilai agama tidak hanya disampaikan melalui pengajian atau ceramah, tetapi diwujudkan dalam

⁶⁴ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, op. cit., hlm. 45-49.

⁶⁵ Hilman Latief dan Haedar Nashir, "Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia," op. cit., hlm. 294-299.

bentuk lembaga pendidikan, rumah sakit, panti sosial, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Nakamura menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah tidak hanya berada pada struktur formal, tetapi juga pada jaringan keseharian warga, keluarga, pendidikan, dan aktivitas lokal.⁶⁶ Karena itu, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai gerakan yang bekerja melalui hubungan antara ideologi, organisasi, dan praktik sosial. Pelembagaan nilai inilah yang membedakan Muhammadiyah dari tindakan sosial yang bersifat individual dan spontan.

Sebagai gerakan sosial Islam, Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang berjenjang. Struktur tersebut memungkinkan nilai dan program organisasi dijalankan dari tingkat pusat hingga tingkat lokal. Asep Suryana menjelaskan bahwa gerakan lokal Muhammadiyah bekerja melalui keterlibatan warga dan orientasi membangun keadilan dari bawah.⁶⁷ Dalam konteks ini, Muhammadiyah tidak hanya dilihat dari organisasi pusatnya, tetapi juga dari bagaimana ranting, cabang, dan komunitas lokal menjalankan nilai organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dikonseptualisasikan sebagai aktor kolektif yang bekerja melalui jaringan kelembagaan dan relasi sosial.

Muhammadiyah juga memiliki karakter dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata. Dakwah dalam pengertian ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian ajaran agama secara verbal, tetapi melalui pelayanan dan pemecahan persoalan sosial. Ro'fah menunjukkan bahwa organisasi otonom seperti 'Aisyiyah turut memperluas kerja sosial Muhammadiyah, terutama dalam bidang pendidikan, perempuan, dan pelayanan masyarakat.⁶⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah

⁶⁶ Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*, Yogyakarta, terj. Yusron Asrofi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 67-72.

⁶⁷ Asep Suryana, *Membangun Keadilan Kota dari Bawah*, op. cit., hlm. 112-118.

⁶⁸ Ro'fah, *Posisi dan Jatidiri 'Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan, 1917-1998* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 92-98.

bekerja melalui jejaring internal yang melibatkan berbagai unsur organisasi. Dengan demikian, praktik sosial Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari kerja kolektif antara persyarikatan, organisasi otonom, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Muhammadiyah ditempatkan sebagai konsep untuk menjelaskan siapa aktor yang menjalankan praktik filantropi. Muhammadiyah tidak dipahami sebagai individu, melainkan sebagai aktor sosial kolektif yang memiliki nilai, struktur, dan jaringan sosial. Konsep aktor kolektif penting karena tindakan filantropi tidak terjadi secara terpisah, tetapi dibentuk melalui organisasi, kader, amal usaha, dan kegiatan sosial-keagamaan. Burhani menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki dinamika internal antara puritanisme, pembaruan, dan orientasi kemajuan yang membentuk wajah gerakannya.⁶⁹ Karena itu, Muhammadiyah perlu dilihat sebagai organisasi yang terus membangun makna sosial melalui praktik kolektifnya.

Dengan demikian, Muhammadiyah dalam kerangka konseptual ini dipahami sebagai gerakan sosial-keagamaan, aktor masyarakat sipil, dan aktor kolektif dalam praktik filantropi. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai keagamaan dapat diorganisasikan menjadi tindakan sosial yang terarah dan berkelanjutan. Muhammadiyah tidak hanya menjadi latar organisasi, tetapi menjadi subjek yang melakukan, mengelola, dan memberi makna pada praktik sosial. Dalam kerangka penelitian ini, Muhammadiyah berfungsi sebagai penghubung antara nilai Islam, kerja organisasi, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, konsep Muhammadiyah penting untuk membaca filantropi sebagai tindakan kolektif, bukan sekadar tindakan individual.

1.6.3 Ajaran Al-Maun

Al-Ma'un merupakan ajaran Islam yang menekankan keterhubungan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Surat ini tidak

⁶⁹ Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 23-28.

hanya berbicara mengenai kewajiban ritual, tetapi juga mengkritik keberagamaan yang mengabaikan anak yatim, orang miskin, dan kelompok lemah. Dalam konteks ini, Al-Ma'un dapat dipahami sebagai etika sosial Islam yang menuntut agar keberagamaan diwujudkan dalam kepedulian nyata. Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah sejak awal memiliki orientasi pembaruan yang tidak memisahkan pemurnian ajaran Islam dari kerja sosial kemasyarakatan.⁷⁰ Dengan demikian, Al-Ma'un dapat ditempatkan sebagai dasar nilai yang menghubungkan ajaran agama dengan praktik sosial. Pemaknaan ini penting karena Al-Ma'un membantu menjelaskan bahwa kesalehan dalam Islam tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial.

Dalam sejarah Muhammadiyah, Al-Ma'un memiliki posisi penting karena menjadi salah satu dasar moral gerakan sosial K.H. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tidak membaca Al-Ma'un sebatas teks normatif, tetapi menjadikannya sebagai dorongan untuk mengubah pemahaman agama menjadi aksi sosial. Abdul Munir Mulkhan menjelaskan bahwa cara Ahmad Dahlan memahami Al-Qur'an selalu diarahkan pada pertanyaan apakah sebuah perintah sudah diamalkan atau belum.⁷¹ Dengan cara membaca seperti ini, Al-Ma'un tidak berhenti sebagai ajaran yang dihafalkan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, Al-Ma'un dapat dipahami sebagai ajaran yang menuntut praksis sosial. Agama dalam kerangka ini tidak cukup dipahami, tetapi juga harus dikerjakan dalam kehidupan sosial.

Al-Ma'un juga mengandung kritik terhadap keberagamaan yang formalistik. Seseorang dapat menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi tetap kehilangan makna keberagamaan apabila tidak memiliki kepedulian terhadap penderitaan sosial. Andri Gunawan menjelaskan bahwa Ahmad

⁷⁰ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, op. cit., hlm. 31-35.

⁷¹ Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah* (Jakarta: Percetakan Persatuan, 1990), hlm. 65.

Dahlan menafsirkan Al-Ma'un ke dalam tiga bentuk utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penyantunan terhadap orang miskin.⁷² Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Al-Ma'un memiliki arah sosial yang konkret. Keberagamaan tidak hanya diukur dari ritual, tetapi juga dari keberpihakan terhadap kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, Al-Ma'un dapat dipahami sebagai etika sosial yang mengarahkan umat pada tindakan memberi, melayani, dan membebaskan.

Ajaran Al-Ma'un juga dapat dibaca sebagai dasar keberpihakan terhadap kelompok dhuafa dan mustadh'afin. Zakiyuddin Baidhawiy membedakan dhuafa sebagai kelompok lemah dan mustadh'afin sebagai kelompok yang dilemahkan oleh struktur sosial yang tidak adil.⁷³ Pembedaan ini penting karena Al-Ma'un tidak hanya berbicara tentang belas kasih kepada orang miskin, tetapi juga tentang kesadaran terhadap ketimpangan sosial. Dalam perspektif ini, kepedulian kepada kelompok lemah bukan sekadar tindakan karitatif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk menghadirkan keadilan. Al-Ma'un mendorong umat beragama untuk tidak pasif melihat kemiskinan dan penderitaan. Karena itu, Al-Ma'un memiliki relevansi kuat dalam menjelaskan basis nilai filantropi.

Sebagai etika sosial Islam, Al-Ma'un berkaitan erat dengan gagasan tauhid sosial. Amien Rais menjelaskan bahwa tauhid menuntut adanya keadilan sosial karena eksploitasi manusia atas manusia bertentangan dengan persamaan derajat manusia di hadapan Allah.⁷⁴ Dalam kerangka ini, Al-Ma'un dapat dipahami sebagai ajaran yang mempertemukan iman, ibadah, dan tanggung jawab kemanusiaan. Tindakan memberi dan membantu tidak hanya dipandang sebagai kemurahan hati,

⁷² Andri Gunawan, "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah," op. cit., hlm. 161-163.

⁷³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Teologi Neo Al-Maun: Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21* (Jakarta: Civil Islamic Institute, 2009), hlm. 103.

⁷⁴ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Bandung: Zaman, 1998), hlm. 41-43.

tetapi juga sebagai bagian dari pengamalan nilai agama. Qorib juga menekankan bahwa aktivitas kemanusiaan Muhammadiyah berangkat dari nilai Islam yang dilembagakan dalam gerakan sosial.⁷⁵ Dengan demikian, Al-Ma'un menjadi dasar moral yang menjelaskan mengapa filantropi Muhammadiyah tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mengandung orientasi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam penelitian ini, Al-Ma'un ditempatkan sebagai konsep yang menjelaskan basis nilai praktik filantropi. Al-Ma'un dipahami sebagai ajaran atau etika sosial Islam yang membantu membaca mengapa tindakan memberi dan melayani dilakukan. Konsep ini penting karena filantropi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas bantuan, tetapi sebagai tindakan sosial yang lahir dari nilai moral-keagamaan. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, Al-Ma'un menghubungkan filantropi dengan rasionalitas nilai, yaitu ketika aktor melakukan tindakan karena meyakini adanya nilai agama yang harus diwujudkan. Dengan demikian, Al-Ma'un membantu menjelaskan filantropi sebagai praktik sosial berbasis nilai sekaligus memberi arah bagi tindakan sosial, kesalehan sosial, dan kebermanfaatan bagi sesama.

1.6.4 Inner-worldly asceticism

Inner-worldly asceticism atau *Inner-worldly asceticism* merupakan konsep yang digunakan Max Weber untuk menjelaskan bentuk keberagamaan yang tidak menarik diri dari dunia, tetapi justru bekerja aktif di dalam dunia. Konsep ini berbeda dari asketisme luar-dunia yang cenderung menjauh dari kehidupan sosial untuk mencapai keselamatan spiritual. Dalam *Inner-worldly asceticism*, aktor tetap berada dalam kehidupan sosial, bekerja, berorganisasi, dan menjalankan tanggung jawab duniawi, tetapi dengan disiplin moral yang kuat. McKinnon menjelaskan bahwa dalam tesis Weber, etika Protestan tidak hanya berkaitan dengan

⁷⁵ Muhammad Qorib, "Muhammadiyah Humanitarian Theology: Responding to Contemporary Global Crises," op. cit., hlm. 1-15.

kerja, tetapi dengan hubungan antara keyakinan religius dan pembentukan perilaku ekonomi yang rasional.⁷⁶ Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* tidak dapat dipahami sebagai kemiskinan atau penolakan total terhadap dunia. Konsep ini lebih tepat dibaca sebagai cara agama membentuk disiplin diri, kerja keras, pengendalian diri, dan orientasi moral dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemikiran Weber, *Inner-worldly asceticism* lahir dari perubahan cara memahami keselamatan dan kerja. Pada tradisi Protestan tertentu, terutama Calvinisme, kerja duniawi dipahami sebagai panggilan moral yang harus dijalankan secara serius dan disiplin. Zaleski menegaskan bahwa Weber membedakan beberapa tipe orientasi religius, salah satunya *Inner-worldly asceticism* yang menempatkan dunia sebagai ruang tindakan religius.⁷⁷ Artinya, dunia tidak dipandang semata sebagai godaan yang harus ditinggalkan, tetapi sebagai medan untuk membuktikan kedisiplinan moral. Dari sinilah kerja, keteraturan, dan pengendalian diri memperoleh makna religius. Oleh karena itu, *Inner-worldly asceticism* memperlihatkan hubungan antara agama, tindakan sosial, dan rasionalisasi perilaku.

Inner-worldly asceticism memiliki hubungan erat dengan gagasan kerja sebagai panggilan. Weber menunjukkan bahwa etika Protestan memberi makna moral pada pekerjaan sehari-hari, sehingga kerja tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai kewajiban yang memiliki nilai spiritual. Dalam pembacaan Gorski, Weber tidak hanya membahas kapitalisme sebagai sistem ekonomi, tetapi juga proses disiplin sosial yang membuat individu mampu mengatur diri dalam kehidupan duniawi.⁷⁸ Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* dapat dipahami

⁷⁶ Andrew M. McKinnon, "Elective Affinities of the Protestant Ethic: Weber and the Chemistry of Capitalism," *Sociological Theory* 28, no. 1 (2010), hlm. 108-112.

⁷⁷ Paweł Stefan Zaleski, "Ideal Types in Max Weber's Sociology of Religion: Some Theoretical Inspirations for a Study of the Religious Field," *Polish Sociological Review* 3, no. 171 (2010), hlm. 321-324.

⁷⁸ Philip S. Gorski, "The Protestant Ethic and the Spirit of Bureaucracy," *American Sociological Review* 60, no. 5 (1995), hlm. 783-786.

sebagai proses pembentukan etos tindakan. Aktor menjadi terdorong untuk bekerja keras, hidup hemat, menghindari kemewahan berlebihan, dan memaknai kerja sebagai kewajiban moral. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa agama dapat membentuk perilaku sosial yang teratur dan rasional.

Namun, *Inner-worldly asceticism* tidak boleh dipahami secara sempit sebagai ajaran untuk mencari kekayaan. Dalam tesis Weber, akumulasi ekonomi muncul sebagai akibat tidak langsung dari kedisiplinan, kerja keras, dan penolakan terhadap pemborosan. Becker dan Woessmann menjelaskan bahwa perdebatan tentang Weber menunjukkan adanya hubungan kompleks antara agama, pendidikan, dan perilaku ekonomi, sehingga tesis Weber tidak dapat dibaca secara tunggal.⁷⁹ Karena itu, konsep *Inner-worldly asceticism* perlu dipakai secara hati-hati dalam penelitian sosial. Fokus utamanya bukan pada kekayaan, tetapi pada bagaimana nilai agama membentuk tindakan yang disiplin dan terarah. Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* lebih tepat dipahami sebagai etos tindakan daripada sekadar etos ekonomi.

Inner-worldly asceticism juga berkaitan dengan pengendalian diri. Dalam konteks Weberian, aktor tidak hanya bekerja karena kebutuhan material, tetapi karena ada tuntutan nilai yang membuat tindakan itu dianggap benar dan bermakna. Van Hoorn dan Maseland menunjukkan bahwa etika kerja Protestan sering dipahami sebagai seperangkat nilai yang menekankan kerja keras, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap disiplin.⁸⁰ Nilai-nilai tersebut tidak selalu harus dibaca dalam konteks Protestan secara historis, tetapi dapat menjadi alat analisis untuk memahami bagaimana agama membentuk orientasi tindakan. Dengan kata lain, *Inner-*

⁷⁹ Sascha O. Becker dan Ludger Woessmann, "Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History," *The Quarterly Journal of Economics* 124, no. 2 (2009), hlm. 531-538.

⁸⁰ André van Hoorn dan Robbert Maseland, "Does a Protestant Work Ethic Exist? Evidence from the Well-Being Effect of Unemployment," *Journal of Economic Behavior & Organization* 91 (2013), hlm. 1-4.

worldly asceticism dapat dipinjam sebagai konsep untuk membaca hubungan antara nilai religius dan perilaku sosial. Pemakaian konsep ini tetap harus memperhatikan konteks sosial dan agama yang sedang diteliti.

Dalam perkembangan kajian Weberian, *Inner-worldly asceticism* juga sering dibaca ulang melalui hubungan antara agama, pendidikan, dan pembentukan kapasitas sosial. Boppert, Falkinger, dan Grossmann menunjukkan bahwa tradisi keagamaan dapat berhubungan dengan pembentukan keterampilan, literasi, dan orientasi kerja dalam masyarakat.⁸¹ Hal ini memperluas pemahaman bahwa *Inner-worldly asceticism* tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, tetapi juga dengan proses pembentukan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, agama dapat mendorong aktor untuk membangun kebiasaan hidup yang teratur, produktif, dan berorientasi pada kebermanfaatan. *Inner-worldly asceticism* menjadi penting karena menjelaskan bagaimana nilai religius bekerja melalui praktik sehari-hari. Oleh karena itu, konsep ini dapat digunakan untuk membaca tindakan sosial yang dibentuk oleh etos, disiplin, dan tanggung jawab moral.

Pemakaian *Inner-worldly asceticism* di luar konteks Protestan perlu dilakukan sebagai adaptasi konseptual, bukan pemindahan mentah-mentah. Spater dan Tranvik menunjukkan bahwa tesis Weber terus diperdebatkan karena hubungan antara Calvinisme, industrialisasi, dan etos kerja tidak selalu sederhana.⁸² Oleh sebab itu, dalam penelitian ini *Inner-worldly asceticism* tidak digunakan untuk menyamakan tradisi Islam dengan Protestan. Konsep ini hanya dipinjam sebagai tipe ideal untuk membaca bagaimana nilai agama dapat membentuk etos tindakan. Pemakaian seperti ini memungkinkan peneliti melihat unsur kerja keras, disiplin, kesederhanaan, dan pengendalian diri tanpa harus memaksakan sejarah

⁸¹ Timo Boppert, Josef Falkinger, dan Volker Grossmann, "Protestantism and Education: Reading (the Bible) and Other Skills," *Economic Inquiry* 52, no. 2 (2014), hlm. 874-878.

⁸² Jeremy Spater dan Isak Tranvik, "The Protestant Ethic Reexamined: Calvinism and Industrialization," *Comparative Political Studies* 52, no. 13-14 (2019), hlm. 1963-1968.

Protestan ke dalam konteks Islam. Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* berfungsi sebagai alat analisis sosiologis, bukan sebagai penyamaan teologis.

Dalam penelitian ini, *Inner-worldly asceticism* ditempatkan sebagai konsep untuk membaca etos tindakan dalam praktik filantropi. Konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai agama mendorong aktor tetap aktif di dunia melalui kerja sosial, pelayanan, kedisiplinan, pengendalian diri, dan orientasi kebermanfaatan. Rudnykyj menunjukkan bahwa dalam konteks Islam kontemporer, nilai agama juga dapat membentuk etika kerja, disiplin diri, dan orientasi moral dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Dalam kerangka penelitian ini, *Inner-worldly asceticism* tidak dipakai untuk menjelaskan pencarian kekayaan individual, melainkan untuk membaca bagaimana etos keagamaan diarahkan pada kesalehan sosial dan manfaat kolektif. Dengan demikian, *Inner-worldly asceticism* membantu menjelaskan hubungan antara nilai keagamaan, etos tindakan, dan praktik filantropi.

1.6.5 Rational Ordering of Life

Rational Ordering of Life merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan sosial dibentuk melalui penataan tindakan yang rasional, terarah, dan bermakna. Dalam kerangka Weberian, konsep ini berkaitan dengan tindakan sosial, yaitu tindakan yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, *Rational Ordering of Life* tidak hanya menunjuk pada kehidupan yang tertata secara formal, tetapi juga pada cara individu atau kelompok mengarahkan tindakannya berdasarkan nilai, tujuan, dan orientasi hidup tertentu.

Dalam pemikiran Max Weber, kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses rasionalisasi. Rasionalisasi menjelaskan kecenderungan tindakan manusia untuk disusun secara lebih sistematis, metodis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, rasionalitas dalam

pengertian Weber tidak hanya berbentuk rasionalitas instrumental yang mengejar efisiensi atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa rasionalitas substantif yang berakar pada nilai moral, etis, atau religius.⁸³ Dengan demikian, *Rational Ordering of Life* dapat dipahami sebagai penataan hidup yang dibentuk oleh kesadaran nilai dan diwujudkan dalam tindakan sosial yang konsisten.

Konsep ini juga berkaitan dengan istilah *Lebensführung* atau tata laku kehidupan. *Lebensführung* menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok menjalankan hidupnya melalui pilihan, disiplin, dan pengarahan diri dalam kehidupan sehari-hari. Abel dan Cockerham menekankan bahwa *Lebensführung* tidak tepat jika hanya dipahami sebagai “gaya hidup”, karena istilah tersebut lebih menunjuk pada *conduct of life* atau cara hidup yang melibatkan pilihan dan pengarahan tindakan.⁸⁴ Dalam pengertian ini, kehidupan yang rasional bukan sekadar kehidupan yang teratur, tetapi kehidupan yang diarahkan oleh nilai tertentu dan diwujudkan melalui praktik yang berulang.

Rational Ordering of Life juga dapat dibaca dalam hubungan antara agama dan tindakan sosial. Weber menunjukkan bahwa agama tidak hanya bekerja sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga dapat membentuk cara hidup, etos tindakan, dan disiplin moral pemeluknya. Dalam kajian Weber tentang etika Protestan, agama dipahami mampu membentuk tindakan yang metodis, disiplin, dan berorientasi pada dunia.⁸⁵ Kalberg menjelaskan bahwa dalam sosiologi agama Weber, relasi manusia dengan yang sakral dapat merasionalisasi tindakan, terutama ketika keyakinan religius

⁸³ Stephen Kalberg, “Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History,” *American Journal of Sociology* 85, no. 5 (1980), hlm. 1145-1179.

⁸⁴ Thomas Abel dan William C. Cockerham, “Lifestyle or Lebensführung? Critical Remarks on the Mistranslation of Weber’s ‘Class, Status, Party’,” *The Sociological Quarterly* 34, no. 3 (1993) hlm. 551-556.

⁸⁵ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, op. cit., hlm. 95-181.

diterjemahkan ke dalam pola tindakan yang teratur dan bertanggung jawab.⁸⁶

Dalam penelitian ini, *Rational Ordering of Life* digunakan untuk membaca proses penataan amal melalui lima aspek, yaitu orientasi nilai, keteraturan praktik, pembagian peran, mekanisme pengelolaan, dan keberlanjutan tindakan. Tindakan memberi, membantu, melayani, dan mengorganisasi pelayanan sosial dapat dibaca sebagai bagian dari *Rational Ordering of Life* apabila dilakukan secara sadar, berulang, terarah, dan memiliki mekanisme yang memungkinkan praktik tersebut dipertahankan. Dampak sosial, seperti terbukanya akses pendidikan, pembinaan agama, dan bantuan bagi kelompok rentan, dipahami sebagai konsekuensi dari proses penataan tersebut, bukan sebagai unsur pembentuk *Rational Ordering of Life* itu sendiri.

Penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa praktik filantropi Muhammadiyah akar rumput di lingkungan Pasar Agung merupakan bentuk tindakan sosial-keagamaan yang didasari oleh ajaran Al-Ma'un. Ajaran tersebut tidak hanya dipahami sebagai nilai keagamaan, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan nyata melalui tindakan memberi, membantu, dan melayani masyarakat. Praktik filantropi tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Inner-worldly asceticism* untuk melihat bagaimana nilai agama mendorong warga Muhammadiyah hidup sederhana, disiplin dalam beramal, memaknai kerja sosial sebagai ibadah, dan berusaha memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam proses tersebut, nilai keagamaan tidak berhenti sebagai dorongan moral, tetapi membentuk *Rational Ordering of Life*, yaitu penataan hidup yang rasional, terarah, dan konsisten dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, praktik filantropi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai hasil dari internalisasi nilai Al-Ma'un dan etos keagamaan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan sosial yang berulang, terorganisasi, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

⁸⁶ Stephen Kalberg, "The Rationalization of Action in Max Weber's Sociology of Religion," *Sociological Theory* 8, no. 1 (1990) hlm. 58-84.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus berbasis praktik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami praktik filantropi Muhammadiyah-Aisyiyah Abadijaya secara mendalam. Pemahaman tersebut diarahkan pada cara praktik filantropi dijalankan, dimaknai, dan dilembagakan dalam kehidupan sosial sehari-hari di sekitar Pasar Agung, Kota Depok. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berusaha mengetahui pendapat informan, tetapi juga membaca tindakan, relasi sosial, dan konteks yang membentuk praktik filantropi tersebut.

Strategi studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus utama, yaitu praktik filantropi Muhammadiyah akar rumput di lingkungan Pasar Agung. Kasus ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bantuan sosial, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang melibatkan aktor, nilai, ruang sosial, jaringan, serta mekanisme penghimpunan dan distribusi sumber daya. Fokus pada praktik menjadi penting karena filantropi dalam penelitian ini tidak hanya hadir sebagai gagasan normatif, melainkan sebagai tindakan sosial yang berlangsung dalam ruang kehidupan warga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada wawancara, tetapi juga pada pengamatan terhadap praktik filantropi yang berlangsung di lapangan.

1.7.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna subjektif para aktor Muhammadiyah dalam menjalankan praktik filantropi di lingkungan Pasar Agung. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan filantropi, tetapi juga memahami nilai keagamaan yang mendasari keterlibatan para aktor dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, pendekatan kualitatif menjadi dasar

utama untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara nilai agama, tindakan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada kesesuaiannya dengan perspektif asketisme duniawi (*inner-worldly asceticism*) Max Weber serta ketersediaan data dan informasi di lokasi penelitian. Muhammadiyah Ranting Abadijaya dipilih sebagai kasus karena menunjukkan praktik keberagamaan yang tidak menarik diri dari kehidupan dunia, tetapi diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, pelayanan keagamaan, dan filantropi di lingkungan Pasar Agung. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara terperinci mengenai para aktor, makna tindakan, aktivitas organisasi, serta proses pelaksanaan kegiatan filantropi Muhammadiyah.⁸⁷ Penelitian ini juga diarahkan untuk memahami bagaimana nilai Islam, terutama ajaran Al-Ma'un, membentuk etos pengabdian dan kepedulian sosial para aktor Muhammadiyah terhadap masyarakat sekitar.

1.7.2 Subjek Riset

Subjek dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik filantropi Muhammadiyah Abadijaya di sekitar Pasar Agung. Subjek tersebut meliputi Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah Abadijaya, pengelola Masjid Jami' Al-Bahar, Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Pasar Agung, serta warga sekitar yang menjadi penerima manfaat dari kegiatan filantropi. Pemilihan subjek yang beragam dilakukan agar penelitian dapat menangkap praktik filantropi dari berbagai posisi sosial. Dengan demikian, data penelitian tidak hanya berasal dari pihak pengelola, tetapi juga dari pihak yang mengalami, menyaksikan, atau menerima manfaat dari praktik tersebut.

⁸⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 135-138.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap praktik filantropi yang diteliti. Teknik ini digunakan karena tidak semua warga di sekitar Pasar Agung memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan filantropi Muhammadiyah Abadijaya. Selain itu, penelitian ini juga *menggunakan snowball sampling*, yakni penelusuran informan lanjutan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini diperlukan karena praktik filantropi akar rumput sering kali berjalan melalui jaringan sosial informal yang tidak selalu tercatat secara administratif.

Informan utama dalam penelitian ini adalah aktor yang aktif menggerakkan, mengelola, atau memahami kegiatan filantropi Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah Abadijaya. Pihak ini menjadi sumber penting untuk menjelaskan sejarah, bentuk kegiatan, proses pengelolaan, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik filantropi. Sementara itu, informan pendukung adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan praktik tersebut, seperti warga sekitar yang menerima manfaat dan mengetahui keberlangsungan kegiatan filantropi Muhammadiyah di lingkungan Pasar Agung. Pembagian informan ini membantu peneliti membandingkan data dari sisi pengelola dan sisi masyarakat yang bersentuhan dengan praktik filantropi.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pasar Agung, Kota Depok, dengan lokasi utama di sekitar lingkungan sosial tempat praktik filantropi Muhammadiyah dan Aisyiyah Abadijaya berlangsung. Lokasi penelitian meliputi Pasar Agung sebagai ruang sosial-ekonomi, Masjid Jami' Al-Bahar sebagai pusat kegiatan keagamaan, serta TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Pasar Agung sebagai ruang praktik filantropi pendidikan. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan filantropi yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, lokasi penelitian tidak hanya

dipahami sebagai tempat pengumpulan data, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat praktik filantropi dibentuk dan dijalankan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut memperlihatkan hubungan antara aktivitas ekonomi pasar, kehidupan keagamaan, dan praktik solidaritas sosial yang dijalankan oleh warga Muhammadiyah dan Aisyiyah. Di lokasi ini, praktik filantropi tidak hanya hadir dalam bentuk bantuan material, tetapi juga dalam bentuk pelayanan keagamaan, pendidikan, pendampingan, dan solidaritas sosial sehari-hari. Lingkungan Pasar Agung juga memperlihatkan pertemuan antara aktor keagamaan, warga sekitar, pedagang, jamaah, dan kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, kawasan ini relevan untuk memahami bagaimana nilai keagamaan diwujudkan dalam praktik sosial yang konkret.

Penelitian lapangan direncanakan berlangsung selama lima bulan, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Mei 2026. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan orientasi lapangan, observasi praktik filantropi, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, serta verifikasi data kepada informan. Pembatasan waktu ini dilakukan agar proses penelitian tetap terarah dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan skripsi. Meskipun demikian, peneliti tetap memperhatikan kemungkinan adanya data tambahan yang diperlukan apabila terdapat kegiatan filantropi penting di luar jadwal observasi utama.

1.7.4 Peran Peneliti

Posisi peneliti pada penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, mengamati perilaku, atau mewawancarai partisipan.⁸⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif terbatas. Artinya, peneliti hadir secara langsung dalam lingkungan sosial yang diteliti untuk mengamati praktik filantropi yang berlangsung. Namun, peneliti tidak

⁸⁸ Ibid., hlm. 185.

menjadi pengurus, pengambil keputusan, atau pelaksana utama dalam kegiatan filantropi tersebut.

Peran sebagai pengamat partisipatif terbatas memungkinkan peneliti untuk menangkap praktik filantropi secara lebih dekat. Peneliti dapat memperhatikan kegiatan, interaksi antaraktor, penggunaan ruang, pembagian peran, serta cara aktor memaknai tindakan sosial-keagamaannya. Kedekatan dengan lapangan diperlukan agar peneliti tidak hanya memperoleh data berupa pernyataan informan, tetapi juga memahami situasi sosial yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Meskipun demikian, peneliti tetap menjaga jarak analitis agar proses pengumpulan dan penafsiran data tidak sepenuhnya larut dalam pandangan informan.

Peneliti juga melakukan reflektivitas selama proses penelitian. Reflektivitas dilakukan dengan menyadari posisi, asumsi, dan kemungkinan bias peneliti ketika berinteraksi dengan informan maupun ketika menafsirkan data lapangan. Kesadaran ini penting karena penelitian kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam membaca makna dan konteks sosial. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mencatat apa yang dikatakan informan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang membentuk munculnya pernyataan dan praktik tersebut.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang holistik dan kredibel, penelitian ini mengaplikasikan strategi triangulasi metodologis dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama:

A. Wawancara mendalam: Merupakan teknik primer untuk mengelaborasi pengalaman, pemaknaan, dan perspektif Subjek Riset. Wawancara mendalam melibatkan pertemuan tatap muka yang berulang antara peneliti dan Subjek Riset yang ditujukan untuk memahami perspektif Subjek Riset tentang kehidupan mereka.⁸⁹ Wawancara dilakukan secara semi-

⁸⁹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. (Boston: Pearson Education, 2014), hlm. 465-466.

terstruktur dengan instrumen bantu berupa pedoman wawancara agar prosesnya terarah namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban Subjek Riset.

- B. Observasi partisipatif terbatas: Dilakukan untuk memahami praktik filantropi yang dapat diamati secara langsung oleh peneliti. Observasi ini terutama dilakukan pada kegiatan kurban dan kegiatan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Pasar Agung. Dalam kegiatan kurban, peneliti mengamati alur pelaksanaan kegiatan, keterlibatan warga, pembagian peran, interaksi antaraktor, serta proses distribusi daging kurban kepada penerima manfaat. Dalam kegiatan di TK ABA 27 Pasar Agung, peneliti mengamati aktivitas lembaga pendidikan, suasana pelayanan pendidikan, relasi antara guru, anak, orang tua, dan pengelola, serta posisi TK sebagai bagian dari praktik filantropi pendidikan Muhammadiyah-Aisyiyah.
- C. Studi dokumentasi: Penulis menelusuri arsip, foto kegiatan, catatan program, struktur organisasi, serta hal lain yang berkaitan dengan praktik filantropi Muhammadiyah di Pasar Agung. Data terkait digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Selain itu, teknik ini juga membantu peneliti menelusuri keberlanjutan dan pola kegiatan filantropi dari waktu ke waktu. Dengan adanya studi dokumentasi, peneliti dapat membandingkan antara narasi informan, praktik yang diamati, dan jejak administratif atau visual dari kegiatan filantropi.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif dan hermeneutik, di mana interpretasi makna menjadi sentral. Analisis data akan mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga komponen yang saling terkait:⁹⁰

- A. Reduksi Data: Sebuah proses seleksi, abstraksi, dan transformasi data kasar dari lapangan menjadi unit-unit informasi yang bermakna melalui

⁹⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), hlm. 10-12.

proses koding tematik. Tujuannya adalah untuk menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasikan data agar siap untuk dianalisis lebih lanjut.

B. Penyajian Data: Organisasi data terstruktur dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan yang dirancang untuk memvisualisasikan pola, hubungan antar-tema, dan alur fenomena sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Proses interpretatif untuk mengonstruksi makna final dari temuan yang telah terpola. Kesimpulan awal yang muncul akan senantiasa diverifikasi secara kontinu terhadap data lapangan untuk menguji kebenarannya hingga dicapai sebuah kesimpulan yang kokoh.

1.7.6 Triangulasi

Secara teknis, strategi validasi dan reliabilitas data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bertumpu pada teknik yang disebut Neuman sebagai triangulasi.⁹¹ Triangulasi dilakukan pada tahap pengumpulan data, baik melalui triangulasi sumber maupun triangulasi teknik, yaitu dengan memeriksa informasi dari sejumlah informan serta menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data yang sahih. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 7 informan yang terdiri atas Pimpinan Ranting Muhammadiyah Abadijaya selaku DKM Masjid Jami' Al-Bahar, Pimpinan Ranting Aisyiyah Abadijaya sebagai pengelola TK ABA 27 Pasar Agung, serta masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat atau pihak yang terlibat dalam kegiatan filantropi. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas sosial-keagamaan Muhammadiyah dan mengumpulkan dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip organisasi, serta dokumen pendukung lainnya untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dengan menggabungkan sumber informasi dan teknik

⁹¹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, op. cit., hlm. 242.

pengumpulan data yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kredibel dan komprehensif serta memberikan keyakinan bahwa analisis yang disusun mencerminkan praktik filantropi Muhammadiyah di lingkungan Pasar Agung.

1.7.7 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, hasil penelitian ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks yang diteliti dan belum dapat digeneralisasikan secara luas ke konteks lain. Kedua, posisi peneliti sebagai instrumen utama berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam proses analisis, namun hal tersebut diupayakan untuk dikurangi melalui refleksi kritis dan penggunaan triangulasi data. Ketiga, temuan penelitian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah subjek riset serta jangka waktu penelitian yang telah ditentukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini membangun fondasi penelitian dengan menegaskan praktik filantropi Muhammadiyah dan Aisyiyah Abadijaya sebagai objek kajian. Kerangka konseptual penelitian disusun melalui lima konsep, yaitu filantropi, Muhammadiyah, Ajaran Al-Ma'un, *Inner-worldly asceticism*, dan *Rational Ordering of Life*, yang masing-masing digunakan untuk membaca fenomena, aktor kolektif, dasar etik, etos tindakan, dan proses penataan tindakan sosial-keagamaan.

Bab 2: Setting Penelitian menyajikan konteks sosial-spasial dan historis Pasar Agung dan Muhammadiyah di Pasar Agung. Bab ini menggambarkan Pasar Agung sebagai ruang sosial-spasial tempat praktik filantropi Muhammadiyah akar rumput tumbuh dan berkembang. Pembahasan diarahkan pada sejarah sosial kawasan Pasar

Agung, pembentukan komunitas Muhammadiyah melalui migrasi ke Perumnas Depok II Timur, serta profil Masjid Jami' Al-Bahar dan TK ABA 27 Pasar Agung sebagai pusat praksis sosial-keagamaan warga Muhammadiyah dan Aisyiyah. Dengan demikian, Bab 2 tidak hanya menjelaskan lokasi penelitian secara geografis, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang pasar, masjid, sekolah, dan jaringan warga menjadi konteks sosial yang memungkinkan filantropi Muhammadiyah berlangsung secara kolektif.

Bab 3: Temuan lapangan secara murni memberikan pembahasan mengenai praktik filantropi Muhammadiyah di lingkungan Pasar Agung. Pembahasan mencakup aktor-aktor utama yang terlibat serta berbagai bentuk praktik filantropi yang dijalankan. Bab ini juga menguraikan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan filantropi tersebut.

Bab 4: merupakan bagian analisis penelitian. Bab ini mempertemukan temuan lapangan dari Bab 3 dengan lima konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu filantropi, Muhammadiyah, Ajaran Al-Ma'un, *Inner-worldly asceticism*, dan *Rational Ordering of Life*. Pembahasan dimulai dari landasan nilai berupa Al-Ma'un, ibadah, dan hayatan thayyibah; dilanjutkan dengan analisis pelebagaan amal saleh dan proses *Rational Ordering of Life*; kemudian membahas bagaimana orientasi *hayatan thayyibah* diwujudkan melalui kehidupan yang bersahaja, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Bab 5: Penutup menyajikan kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian secara eksplisit, serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan implikasi praktis bagi organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah.